

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA
PADA PEMERINTAH KECAMATAN MOROTAI SELATAN**¹Sahrul Hi. Posi, ²Sang Putu Angga Mahendra Putra¹Program Studi Akuntansi, ²Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Hein Namotemo

Jalan Kompleks Pemerintahan Halmahera Utara Villa Vak I Tobelo, Halmahera Utara, 97762

E-mail: sahrulposi@gmail.com,sangputuangga93@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan membuktikan secara empiris mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang bersifat kausal. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa pada masing-masing pemerintahan desa di Kecamatan Morotai Selatan sedangkan sampel dalam penelitian berjumlah 25 desa, dengan jumlah responden 75 yakni perangkat desa (kades, sekdes dan bendahara) masing-masing setiap desa sebanyak 3 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variable Pengelolaan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. Sedangkan secara parsial, Pengelolaan Keuangan dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa, sedangkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengawasan, berpengaruh positif namun tidak signifikan, terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan

Kata kunci : *Pengelolaan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa*

ABSTRACT

This study aims to find out, analyze and empirically prove the Factors Affecting Village Financial Accountability in South Morotai District Government. This type of research is a causal associative research. The population in this study consisted of the Village Head, Village Secretary and Village Treasurer in each village administration in South Morotai Subdistrict while the sample in the study amounted to 25 villages, with 75 respondents consisting of village officials (village heads, village secretaries and treasurers) each each village of 3 people. The data in this study are primary data with data collection techniques using a questionnaire. The data analysis model uses multiple linear regression analysis. The results of simultaneous hypothesis testing indicate that the variables of Financial Management, Quality of Human Resources, Supervision, and Community Participation partially have a significant effect on Village Financial Accountability. While partially, Financial Management and Community Participation have a positive and significant effect on Village Financial Accountability, while Human Resource Quality and Oversight, positive but not significant effect, on Village Financial Accountability in South Morotai District Government.

Keywords : *Financial Management, Quality of Human Resources, Supervision, Public Participation, Village Financial Accountability*

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi desa sudah dilakukan sejak adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2014. Hal ini berarti desentralisasi sudah diterapkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk mewujudkan tercapainya akuntabilitas dan transparansi, otonom desa harus memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan dana untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk

memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Anisa,2017).

Upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan pengelolaan keuangan yang transparan merupakan tuntutan bagi pemerintah desa dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan.

Munculnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan keuangan desa. Sebagai salah satu kewenangan desa adalah mengelola sumber daya yang ada termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa, pemberian dana desa diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas di pemerintahan desa sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, desa mandiri sesuai dengan nawacita bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan akuntabilitas keuangan desa, kualitas sumber daya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat, beberapa fenomena yang terjadi antara lain: 1) Keterlambatan pencairan anggaran desa untuk periode berikutnya disebabkan oleh keterlambatan kepala desa menyusun Rencana Anggaran Belanja Desa, sehingga laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban terlambat untuk disampaikan kepada Bupati, 2) Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau dilaksanakan pada saat anggaran desa dicairkan sehingga Rencana Anggaran Belanja Desa mengalami perubahan yang signifikan, 3) Kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa, 3) Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal, 4) Meskipun pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun hanya segelintir masyarakat yang aktif terhadap kegiatan/program desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. sehingga inisiatif masyarakat dalam menyampaikan ide-ide strategis tidak sepenuhnya terpenuhi. untuk mencapai cita-cita yang dimaksud diperlukan dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak baik pemerintah desa maupun dari pihak masyarakat sehingga dana desa terealisasi tepat sasaran.

Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya berarti mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban untuk setiap kebijakan publik secara proporsional, dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, dan pemerintahan, serta tersedianya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan desa, sehingga tercapainya *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa sebagai wujud akuntabilitas keuangan desa, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan".

Penelitian bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah Kecamatan Morotai Selatan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya struktur pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada skala desa. Struktur pemerintahan desa tersebut adalah pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai badan legislasi desa, badan aspirasi masyarakat, dan badan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan desa.

2.2. Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya (Anisa, 2017).

Keberhasilan akuntabilitas keuangan desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan desa serta responsive terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas keuangan desa membuka ruang politik bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif.

2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. PPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dan Kaur keuangan. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Dalam penyelenggaraannya kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu bantuan pemerintah dan pemerintah daerah. Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa

2.4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan

produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja. Sumber daya manusia yang efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan upaya peningkatan kinerja, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok kerja, dan pada tingkat organisasi. (Fitri, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat.

2.5. Pengawasan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjamin partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan dan pemantauan pembangunan desa. Pasal 82 UU Desa menyatakan secara tegas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan. Agar hak masyarakat ini dipenuhi dengan baik, maka pasal ini juga memuat kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi rencana pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan, sehingga berdasarkan informasi ini, masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pembangunan desa.

Pengawasan merupakan pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku. Pengawasan sangat penting untuk menilai apakah anggaran yang digunakan sebagai mana mestinya sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Pola pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pemerintah daerah dalam hal ini inspektorat kabupaten wajib memberikan pembinaan dan pengawasan guna terkendalinya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.6. Partisipasi Masyarakat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dalam pembangunan terutama menyangkut pengambilan keputusan pembangunan dalam tingkat komunitas sangat penting.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang bersifat kausal atau sebab akibat. Menurut

Sugiyono (2014) penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil pengujian akan dipakai menjadi dasar menarik kesimpulan, apakah mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari kajian teoritis. Lokasi penelitian dilakukan di masing-masing satuan kerja pemerintahan desa pada wilayah kerja Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa pada masing-masing pemerintahan desa di kecamatan Morotai Selatan sebanyak 25 desa, untuk responden disetiap desa ada 3 orang pejabat pengelola keuangan desa (kades, sekdes, bendahara) sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini ada 75 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yakni dari individu atau perseorangan melalui wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Kuesioner untuk pengumpulan data diantar sendiri oleh peneliti kepada responden.

Pengukuran variabel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengukuran sikap dengan metode likert. Metode Likert dengan skala pengukuran interval menggunakan lima angka penilaian yaitu dengan skor 1 sampai 5, dimana skor 5 (SS= Sangat Setuju), skor 4 (S= Setuju), skor 3 (KS= Kurang Setuju), skor 2 (TS= Tidak Setuju) dan skor 1 (STS= Sangat Tidak Setuju).

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Analisis regresi linier berganda bermaksud untuk memperkirakan bagaimana keadaan akuntabilitas keuangan desa bila dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen. Uji kualitas data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji realibilitas. Adapun pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear atau disebut juga dengan pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas (Latan, 2013).

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e \dots$$

Keterangan :

Y	= Akuntabilitas Keuangan Desa
X ₁	= Pengelolaan Keuangan Desa
X ₂	= Kualitas SDM
X ₃	= Pengawasan
X ₄	= Partisipasi Masyarakat
a	= Konstanta
b ₁ -b ₄	= Koefisien regresi X1, X2, X3 dan X4
e	= Error

Adapun analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat uji sebagai berikut:

1. Uji Simultan (F)

Uji F statistik digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel

bebas yaitu (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4) berupa variabel independen terhadap variabel terikat (Y) yaitu akuntabilitas keuangan desa. kriteria pengambilan keputusan yaitu :

- 1) H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
 - 2) H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
2. Uji t (Parsial)
 Yaitu uji secara parsial untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan (X_1), kualitas sumber daya manusia (X_2), pengawasan (X_3), dan partisipasi masyarakat (X_4) sebagai variabel bebas terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y) sebagai variabel terikat. kriteria pengambilan keputusan:
- 1) H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
 - 2) H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$
3. Koefisien Determinan (R^2)
 Uji koefisien determinan digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. semakin besar nilai koefisien determinan maka semakin baik kemampuan variabel (X) menerangkan variabel (Y).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL

4.1.1. Deskriptif Data

Deskripsi data dimulai dengan gambaran objek penelitian dan deskripsi responden. Gambaran objek penelitian dimasukkan untuk memperoleh gambaran tentang objek penelitian. Adapun deskripsi responden dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden dalam penelitian ini. Rincian data dalam penelitian ini berdasarkan jawaban kuesioner yang diterima langsung dari masing-masing perangkat pemerintah desa, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Sebaran	Kembali	
			Baik	Rusak
1	Kepala Desa	25	25	0
2	Sekretaris	25	25	0
3	Bendahara	25	25	0
Jumlah		75	75	0

Sumber : Data Olahan (2019)

Berdasarkan data penelitian yang telah

dikumpulkan, maka diperoleh data tentang demografi responden penelitian yang terdiri dari: (1) Jenis Kelamin (2) Tingkat pendidikan, (3) Usia . Tabel.2 sampai tabel 4 menyajikan ringkasan demografi responden.

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	59
2	Perempuan	16
Total		75

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Jumlah
1	19 - 30 Tahun	13
2	31 - 40 Tahun	41
3	41 - 50 Tahun	19
4	51 - 60 Tahun	0
5	61 - 70 Tahun	2
Total		75

Sumber: Data Olahan (2019)

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Keterangan	Jumlah
1	SMP	0
2	SMA / Sederajat	49
3	D1	4
4	DIII	1
5	S1	21
Total		75

Sumber: Data Olahan (2019)

4.1.2. Pengujian Kualitas Data

Hasil Uji validitas instrument yang dimaksud dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Uji Validitas Variabel

No	Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)	AKD1	0,593	Valid
		AKD2	0,637	Valid
		AKD3	0,705	Valid
		AKD4	0,586	Valid
		AKD5	0,617	Valid
		AKD6	0,649	Valid
		AKD7	0,631	Valid
		AKD8	0,648	Valid
2	Pengelolaan Keuangan (X ₁)	PK1	0,402	Valid
		PK2	0,490	Valid
		PK3	0,445	Valid
		PK4	0,457	Valid
		PK5	0,494	Valid
		PK6	0,567	Valid
		PK7	0,582	Valid
		PK8	0,638	Valid
		PK9	0,542	Valid
		PK10	0,574	Valid
		PK11	0,495	Valid
		PK12	0,568	Valid
		PK13	0,396	Valid
3	Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₂)	KSDM1	0,517	Valid
		KSDM2	0,623	Valid
		KSDM3	0,448	Valid
		KSDM4	0,616	Valid
		KSDM5	0,685	Valid
		KSDM6	0,721	Valid
		KSDM7	0,607	Valid
3	Pengawasan X ₃	P1	0,519	Valid
		P2	0,619	Valid
		P3	0,619	Valid
		P4	0,623	Valid
		P5	0,558	Valid
		P6	0,526	Valid
		P7	0,505	Valid
		P8	0,418	Valid
4	Partisipasi Masyarakat (X ₄)	PM1	0,534	Valid
		PM2	0,707	Valid
		PM3	0,722	Valid
		PM4	0,676	Valid
		PM5	0,517	Valid
		PM6	0,606	Valid

Sumber: Data diolah (2019)

4.1.3. Uji Reliabilitas Data

Pengujian Uji Reliabilitas data dapat dilihat dengan menggunakan *Alpha Croanbach*. Jika *Alpha Croanbach* > 0,60 maka hasil pengujian data dinyatakan reabel dan tidak reabel jika sama

dengan atau dibawah 0,60.

Tabel 6
Uji Reliabilitas Variabel

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas Keuangan Desa (Y)	0,874	0,6	Reliabel
Pengelolaan Keuangan (X ₁)	0,853	0,6	Reliabel
Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₂)	0,843	0,6	Reliabel
Pengawasan (X ₃)	0,826	0,6	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X ₄)	0,845	0,6	Reliabel

Sumber; Data Olahan (2019)

Tabel 6 menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0,6 sehingga alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel (andal).

4.1.4. Pengujian Asumsi Klasik

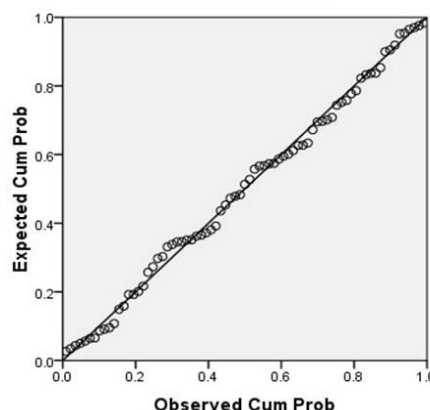
1. Pengujian Normalitas

Pengujian terhadap normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linear memiliki distribusi normal ataukah tidak. Untuk mendeteksi apakah residual data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat grafik-grafik normal *propability plot* dan uji statistik *One-Sampel Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil analisis grafik terlihat pada Gambar 1 serta hasil uji K-S terlihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Gambar 1

Grafik Normal P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
 Dependent Variable: AKD



Sumber; Data Olahan (2019)

Berdasarkan Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-P Plot terlihat titik-titik mengikuti dan

mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 7

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.79192622
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.045
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.405
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997

a. Test distribution is Normal.

Sumber; Data Olahan (2019)

Berdasarkan table 7 hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov Test* diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.sig. (2-tailed)* sebesar 0,997 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa data mempunyai distribusi normal

2. Pengujian Multikolinearitas

Pengujian asumsi klasik multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya problem multikolinieritas pada model regresi adalah dengan melihat nilai dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai yang direkomendasikan untuk menunjukkan tidak adanya problem multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* harus >0,10 dan nilai VIF <10 (Latan, 2013).

Tabel 98
Uji Multikolinearitas
 Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	Pengelolaan Keuangan	.812 1.231
	Kualitas Sumber Daya Manusia	.869 1.151
	Pengawasan	.861 1.161
	Partisipasi Masyarakat	.843 1.186

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa

Sumber; Data Olahan (2019)

Berdasarkan tabel 8 dapat disimpulkan keseluruhan variabel tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas karena *Tolerance* > 0,10 serta nilai VIF < 10. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas

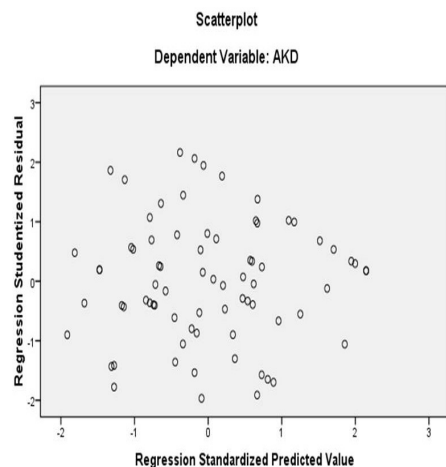
3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah *variance* dari residual data satu observasi ke observasi lainnya berbeda atau tetap. Jika *variance* dari residual data sama disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau yang tidak terjadi problem heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik *scatterplot*, yaitu jika plotting titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi problem heteroskedastisitas (Latan, 2013).

Hasil pengujian scatterpot heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2

Grafik Scatterplot



Sumber; Data Olahan (2019)

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa pengujian asumsi heterokedastisitas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak berkumpul pada satu tempat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

4.1.5. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian

yang harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Sugiyono (2013) menjelaskan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik).

1. Uji Regresi Linear Berganda

Model regresi yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t. Berikut ini merupakan hasil uji regresi dan uji t tiap hipotesis:

Tabel 9
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.835	5.224		.543	.589
Pengelolaan Keuangan	.160	.076	.218	2.098	.040
Kualitas Sumber Daya Manusia	.117	.106	.111	1.102	.274
Pengawasan	.168	.115	.147	1.460	.149
Partisipasi Masyarakat	.532	.130	.417	4.098	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan Desa

R = 0,623

Adjusted R² = 0,388

F = 11.085

Sig. F = 0,000

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang dilakukan, dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 2,835 \text{ AKD} + 0,160 \text{ PK} + 0,117 \text{ KSDM} + 0,168 \text{ P} + 0,532 \text{ PM}$$

Dari persamaan yang terbentuk di atas dapat dijelaskan interpretasinya sebagai berikut:

1. Pada persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta adalah 2,835. Artinya apabila variabel pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam keadaan konstan, maka akuntabilitas keuangan desa adalah sebesar 2,835 satuan.
2. Koefisien regresi pada variabel pengelolaan keuangan sebesar 0,160 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan, ternyata dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sebesar 0,160 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti kualitas sumber daya manusi, pengawasa

dan partisipasi masyarakat berada dalam keadaan konstan.

3. Koefisien regresi pada variabel kualitas sumber daya manusia sebesar 0,117 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, ternyata dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sebesar 0,117 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti pengelolaan keuangan, pengawasan dan partisipasi masyarakat berada dalam keadaan konstan.
4. Koefisien regresi pada variabel pengawasan sebesar 0,168 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel pengawasan, ternyata dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sebesar 0,168 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat

berada dalam keadaan konstan.

5. Koefisien regresi pada variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,532 merupakan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat, ternyata dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa sebesar 0,532 satuan, dengan asumsi bahwa variabel lainnya seperti pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan pengawasan berada dalam keadaan konstan

2. Uji F (Uji Stimulan)

Uji F pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan uji F $P < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Latan dan Temalagi (2013).

Dari uji ANOVA atau f_{test} , didapat f_{hitung} sebesar 11,085 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5$ persen), yang berarti model yang digunakan dalam penelitian ini layak. Jadi variable pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan secara simultan.

3. Uji T (Uji Parsial)

Uji T pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan yang dihasilkan uji t $P < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Latan dan Temalagi (2013).

Hasil pengujian antara variabel terhadap variabel dependen secara individu yang dilakukan dengan uji t bahwa:

- a. Hipotesis menyatakan bahwa variabel pengelolaan keuangan (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan bernilai positif sebesar 0,160 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Hasil ini menunjukkan

bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan desa, maka hipotesis diterima.

- b. Hipotesis menyatakan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia (X_2) mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia bernilai positif sebesar 0,117 dengan tingkat signifikansi sebesar 1,102 lebih besar 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan desa, maka hipotesis diterima.
- c. Hipotesis menyatakan bahwa variabel pengawasan (X_3) mempunyai pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa pengawasan bernilai positif sebesar 0,186 dengan tingkat signifikansi sebesar lebih besar 0,149 ($\alpha = 5$ persen). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan desa maka hipotesis ditolak.
- d. Hipotesis menyatakan bahwa variabel partisipasi masyarakat (X_4) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y). Hasil uji t menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bernilai positif sebesar 0,532 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 ($\alpha = 5$ persen). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa, maka hipotesis diterima.

4. Koefisien Determinasi (*R-Squares*)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *R-Squares* 0,75, 0,50 dan 0,25 menunjukkan bahwa model kuat, sedang dan lemah. Kelemahan mendasar penggunaan *R-Squares* adalah bias

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai *R-Squares* pasti akan meningkat. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R-Squares* dalam mengevaluasi model regresi, dimana nilainya dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam model (Latan dan Temalagi, 2013).

Berdasarkan nilai koefisien korelasi (R) mempunyai nilai sebesar 0.623 yang menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 62,3%. Artinya koefisien pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat mempunyai hubungan dengan akuntabilitas keuangan desa, karena diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 62,3%.

Untuk koefisien determinasi (*Adjusted R²*) mempunyai nilai sebesar 0,388. Artinya hanya 38% akuntabilitas keuangan desa dapat dijelaskan oleh variabel pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar (100%-38% = 62%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung akuntabilitas keuangan desa pada pemerintah kecamatan morotai selatan. Selanjutnya hasil pengujian masing-masing variabel tersebut akan dikaji dalam pembahasan berikut ini:

1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian model regresi variabel secara parsial menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,040 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ serta t hitungnya 2,098. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Subroto (2009) mendeskripsikan bahwa Pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban secara bertahap telah melaksanakan dengan baik secara konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna

pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa, hal ini diprediksi pertama, karena rata-rata pendidikan, pengetahuan dan pemahaman pengelola keuangan pada pemerintahan desa di kecamatan morotai selatan suda memadai. Kedua, Terkait dengan hal tersebut, persepsi responden menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian model regresi variabel secara parsial menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,274 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ serta t hitungnya 1,102.

Hasil penelitian ini secara simultan sejalan dengan penelitian Sihaloho (2014) dalam penelitiannya Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Kualitas SDM, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan secara parsial kualitas sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman yang cukup memadai.

3. Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Pengaruh positif dilihat t hitung 1,460 sedangkan tidak signifikan dilihat dari nilai signifikansi 0,149 lebih besar dari $\alpha = 0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sanjiwani (2014) studi kasus pengelolaan ADD di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013 menyimpulkan bahwa Pengawasan sudah sesuai dengan indikator yang ditentukan. Pengawasan berpengaruh

positif terhadap akuntabilitas keuangan desa diprediksi bahwa kesadaran masyarakat dan auditor internal untuk memahami pentingnya pembangunan desa namun dari segi signifikan pengawasan dilakukan belum optimal.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. pengaruh dilihat dari nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ serta t hitungnya 4,098. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat searah dengan akuntabilitas keuangan desa, dimana semakin meningkatnya partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.

Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atikah,dkk (2016) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat arah hubungan yang positif dan signifikan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan keduanya dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Dari hasil variabel tersebut diprediksi karena peranan pemerintah desa dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa sehingga kesadaran dan inisiatif masyarakat aktif dalam proses evaluasi kinerja keuangan pemerintah desa. Dari persepsi responden bahwa kepala desa menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbangdes) dan penyusunan RPJM-Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dalam pengambilan keputusan serta mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas kepentingan dan kebutuhan desa.

5. Pengaruh Pengelolaan Keuangan, Kualitas Sumberdaya Manusia, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variable pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan, dan partisipasi

masyarakat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Hal ini dapat diketahui dimana nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,000 < \alpha = 0,05$).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa, berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan antara lain sebagai berikut :

1. Secara simultan, pengelolaan keuangan, kualitas sumber daya manusia pengawasan, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan
2. Secara parsial, pengelolaan keuangan dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa, pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan.

Saran

Adapun saran penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan, kualitas sumberdaya manusia, pengawasan

1. Sesuai dengan keterbatasan penelitian yakni hanya meneliti empat variable dan objek penelitian sebatas pemerintah desa, maka untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang belum ada pada penelitian ini, dan menambah objek observasi penelitian serta menambahkan responden dari masyarakat desa.
2. Aparat Pemerintah Desa pada Pemerintah Kecamatan Morotai Selatan diharapkan terus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, diantaranya mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan desa, agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan dan standart yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Anisa Nur., Nafidah Nasehatun Lina. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi. Volume 10 (2), P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190. Page 273 – 288
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Wahyuni.,Putra Suarjaya.,Sinarwati Kadek. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol : 8 No : 2 Tahun 2017).
- Fitri. 2015. *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi*. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, hlm 180-192, ISSN: 2302-2019
- Andreeyan Rizal. 2014. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. Universitas Mulawarman. eJournal Administrasi Negara, Volume 2, Nomor 4, 2014: 1938 – 1951
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Latan Hengky dan Temalagi Selva, 2013. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Penerbit: ALFABETA. Bandung